

ORASI ILMIAH
PERGOLAKAN TRADISI DAN MODERNITAS
PASCA ORDE BARU
(Menelisis Eksistensi Adat dalam Politik Lokal)



Oleh:

DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum

*Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister
Universitas Khairun, Tanggal 1 September 2012*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

2012

Bismillahirrahmannirrahim,

Yang Terhormat,

- Dewan Penyantun Universitas Khairun
- Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Senat Universitas Khairun,
- Rektor dan Wakil Rektor, Para Dekan dan Segenap Civitas Akademik Universitas Khairun
- Gubernur Provinsi Maluku Utara
- Walikota Ternate
- Bapak/Ibu Muspida Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate
- Teristimewa para Wisudawan/Wisudawati yang saya banggakan
- Serta para Undangan dan hadirin yang berbahagia

Assamulaikum Warahtullahi Wabarakaatuh

Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk Kita Semua

Tiada kata yang tepat untuk diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia ini untuk bersama-sama mengikuti Sidang Terbuka Senat Universitas Khairun dengan acara Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Khairun.

Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di depan Sidang Terbuka Senat Universitas Khairun. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: **"PERGOLAKAN TRADISI DAN MODERNITAS PASCA ORDE BARU: Menelisik Eksistensi Adat dalam Politik Lokal.1**

Mengawali orasi ilmiah ini, ada baiknya kita simak pendapat sejarawan James Harvey (1965) yang mengungkapkan bahwa politik masa lalu adalah sejarah masa kini dan politik masa kini adalah sejarah masa depan. Pendapat ini sungguh bermakna—terutama dalam konteks sejarah—sebab setiap manusia pasti menempu episode kehidupan yang bersentuhan dengan masa lalu, masa kini dan masa depan dengan fragmen berbeda-beda. Dalam pengertian lain, jika seseorang atau sekelompok manusia berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan masyarakat masa lalu, maka tentu akan menjadi bermakna bagi kehidupan masyarakat masa kini dan dapat dijadikan prestasi berharga sebagai peluang dan kesempatan meraih kesuksesan di masa depan. Konsep ini dalam pandangan Harvey (1965) adalah bagian dari politik sejarah (*political of histories*).

Orasi ilmiah pada hari ini mencoba menelisik eksistensi adat pada sistem pengelolaan pemerintahan dan politik lokal pasca Orde Baru yakni dari sentralisasi ke desentralisasi. Fokus bahasannya lebih pada aras penggunaan simbol-simbol tradisi atau adat dalam berbagai segmen kehidupan terlebih pada soal politik lokal.

Orasi Ilmiah ini disampaikan pada acara wisuda Sarjana dan Magister Universitas Khairun Ternate 1 September 2012

Hadirin yang saya hormati

Istilah 'adat' dalam bahasa Indonesia memiliki arti 'kebiasaan' atau 'tradisi', dan mengandung konotasi baik yang tenang dan konsensus. Namun dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang diasosiasikan dengan aktivisme, protes, konflik yang disertai kekerasan. Hal ini sangat terasa sejak turunnya Presiden Soeharto pada 1998 setelah sepertiga abad menjalankan pemerintahan otoritarian. Berbagai komunitas dan kelompok etnis di seluruh Indonesia secara bebas dan terbuka menuntut haknya untuk melaksanakan unsur-unsur adat atau hukum adatnya di masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, atas nama adat, penduduk desa di Bali menolak sejumlah proyek pembangunan pemerintah berskala besar. Atas nama adat, kebangkitan politik dan budaya di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang lama terpinggirkan telah melahirkan sebuah gerakan kekerasan massa terhadap kaum pendatang. Bahkan kesultanan-kesultanan yang telah lama tertidur pula mulai dari Sumatera sampai Maluku Utara mendadak menggeliat bangun kembali dan menunjukkan keberadaannya. Para aktivis di daerah atau sampai pusat menjalin kekuatan bersama untuk membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi masyarakat adat tingkat nasional yang pertama di Indonesia sebagai upaya mempengaruhi kebijakan.

Dalam konteks pengkajian budaya/tradisi masyarakat secara umum, fenomena kebangkitan peran "adat" ini dibenarkan oleh David & Jamie (2010) sebagai manifestasi lain dari kebangkitan adat di Indonesia pasca-Soeharto. Sebuah gerakan yang kemunculannya hampir tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pengamat Indonesia. Hal ini bisa dipahami sebab pada rezim orde baru, pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial ini (baca: lembaga adat) dibelenggu dan dikendalikan ruang gerakannya secara rapi. Banyak pengamat luar negeri berharap, desentralisasi dan perombakan negara otoritarian (pasca orde baru) mampu membawa proses demokratisasi yang semakin bermakna, dengan komitmen-komitmen lokal untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), yang memainkan peran kunci dalam sebuah masyarakat sipil (*civil society*) yang semakin matang.

Hadirin yang saya hormati

Jika ditelusur ke luar, seiring dengan adanya perubahan dalam orientasi ideologis alturisme politik, beberapa negara maju semisal Amerika Serikat, Denmark, dan Inggris juga memiliki gejala yang sama yakni lahirnya gerakan berorientasi pada pembelaan hak-hak masyarakat adat (*tribal peoples*) atau masyarakat "dunia keempat". Kebangkitan politik penduduk asli Amerika (*native Americans*), sebagian terinspirasi oleh gerakan hak-hak sipil kaum kulit hitam yang terjadi sejak awal 1960-an. Kemudian diikuti dengan pembentukan sejumlah gerakan proxy (*proxy movement*) di beberapa negara diantaranya: *The International Work Group for Indigenous Affairs* (IWGIA) di Denmark pada 1968, *Survival International* di Inggris pada 1969, dan *Cultural Survival* di Amerika Serikat pada 1976.

Berbagai hipotesis sering kita temui saat ini menyatakan bahwa bangkitnya gerakan perubahan dengan menggunakan simbol-simbol "adat" adalah bagian dari sikap/sanggahan masyarakat atas kebijakan sebuah negara yang dianggap tidak membela kepentingan rakyat kecil. Di Indonesia, pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba (bukan warga) yang tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu.

Orasi lisan ini disampaikan pada acara wisuda Sarjana dan Magister Universitas Khairun Ternate 1 September 2012

Pelbagai bentuk pajak dan upeti ditarik oleh penguasa melalui aparat represifnya yang menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk.

Politik lokal di Indonesia kemudian semakin dinamik setelah proklamasi kemerdekaan. Ketika itu kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legasi positif dari rancangan kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam terlibat dalam kepolitikan pada konteks implementasi politik etis (Leo Agustino, 2010). Di sini para elite tradisional (bangsawan daerah) harus bersaing dengan masyarakat umum yang juga berusaha keras mendapat posisi dalam lembaga-lembaga parlemen baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, masalah etnisitas juga menonjol dalam kerangka *nation building* di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati

Dinamisasi politik lokal di atas tidak bertahan selama-lamanya. Ketegangan politik yang bermula etnisitas meningkat dengan cepat semasa Demokrasi Parlementer (1950-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) khususnya luar Jawa di mana militer ikut campur tangan. Saat itu rakyat sangat merasa dikucilkan dari keikutsertaannya dalam politik nasional, karena itu manakala Orde Baru menubuhkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966, muncul semacam euforio yang bertolak belakang di daerah. Ini karena Orde Baru dipandang sebagai bentuk polisentrisme dan 'politik baru' yang membebaskan walaupun polisentrisme dan politik baru ini sebenarnya menandai atau menjadi sebab-musabab permulaan satu rezim yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan neo-kolonial.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, model perpolitikan dan peran masyarakat (dan elite) disemua level menunjukkan sikap resistensi terhadap model 'politik lama' yang otokratik, represif, dan memusat (sentralisme). Leo Agustino (2010) mendefinisikan sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk meniadak gagasan (atau penguasa) lama yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan rakyat. Model politik baru ini, kemudian merubah mekanisme perpolitikan di level lokal. Wujudnya dapat dilihat pada sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung.

Otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 dan dilaksanakan dua tahun kemudian juga membuka peluang bagi pembatalan pelbagai mekanisme pungutan liar, pemberhentian penjarahan keuangan negara oleh elite lokal dan penolakan atas budaya bosisme dan *local strongmen* di daerah. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh pusat di daerah terdekonstruksi sehingga individu yang dianggap sebagai 'orang Jakarta' (yang berada di daerah) terdelegitimasi kedudukannya karena polisentrisme politik telah mengalahkan logika sentralisme politik.

Hadirin yang saya hormati

Ini tidak berarti bahwa budaya bosisme dan orang kuat lokal (*local strongmen*) telah lenyap melainkan terjadi pergantian pemeran dari tokoh nasional ke tokoh lokal. Agus Yusoff (2010) mengungkapkan bahwa para broker dan *local strongmen* yang mengambil alih kekosongan pemain dalam arena politik lokal pada orde reformasi biasanya adalah 'broker lama'. Sedangkan Robinson (2004) mengungkapkan bahwa para broker dan *local strongmen* yang berhasil menancapkan kukuhnya lebih dalam lagi pada era reformasi adalah para pemain lama yang pada masa sebelumnya telah menjadi proksi Orde Baru. Tetapi karena kemampuannya untuk melakukan reorganisasi kekuatan mereka berhasil

menjadi orang kuat lokal dan berkuasa dibanding masa sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan ada dua kategori orang kuat lokal yakni mereka yang bercokol di era orde baru dan baru lahir dari rahim reformasi.

Perannya sangat kuat yaitu menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan, jika tidak, maka mereka selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuannya agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis posisinya. Imbalan jasa para politisi kepada broker politik tidak jarang dilandaskan pada jasa investasi politik selama berlangsungnya Pemilu. Juga, karena mau menjadi "tameng" penguasa apabila terjadi unjuk rasa kelompok oposisi, mahasiswa buruh dan lainnya. Berkaitan dengan itu juga, Harris White (1999) mengatakan bahwa orang kuat lokal dapat hidup dengan hanya memanfaatkan kedekatan (istilah sekarang disebut para tim sukses) dengan pemerintahan sehingga ia terus mendapatkan proyek dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, di samping terus berupaya mengendalikan pimpinan daerah dan parlemen. Sebuah tradisi patut mendapat perhatian kita semua karena ikut melemahkan peran negara dalam mengelola pemerintahannya.

Di Thailand, merujuk pada kajian McVey dalam buku *Money and power in provincial Thailand*, para bos lokal menjadi realitas sejarah dalam kehidupan politik lokal. Para bos dan *local strongmen* di Thailand dikenal dengan istilah *chao pho* yang berarti 'bapak pelindung' (McVey, 2000). Kehadiran 'bapak pelindung' ini bukan fenomena baru, tetapi eksistensi mereka sebagai elite politik lokal tradisional yang semakin menguat monopolistik mereka di hampir semua kegiatan ekonomi mulai dari pertambangan, transportasi, pertanian, pabrik pengolahan, saham bank dan lainnya. Selain itu, para *chao pho* terlibat aktif dalam usaha ilegal seperti perdagangan narkoba, perjudian, dan penyeleludupan (Arghiros, 2001).

Hadirin yang saya hormati

Hasil penelitian di Medan tentang *Power and Politics in North Sumatra* oleh Vedi R. Hadiz (2003) menemukan bahwa orang kuat lokal yang memainkan peran politik baru setelah Orde Baru di Medan adalah para pengusaha tingkat menengah yang paling tidak sebagiannya sangat tergantung pada proyek dari pemerintah, dan aktivitas yang terkait dengan organisasi-organisasi semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GNMKI).

Serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh Vedi R. Hadiz (2003) dan Klinken, (2007) juga menemukan bahwa selain di Aceh Tenggara dan Medan, beberapa daerah lain di Indonesia juga menjamurnya para bos ekonomi yang berprofesi sebagai politisi. Bahkan daerah seperti Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan lainnya mengikutsertakan kepemimpinan bangsawan lokal, pemuka agama, dan tokoh adat sebagai pelakon politik. Para *local strongmen* ini dengan mudah menggerakkan masyarakat awam sesuai dengan perintahnya melalui manipulasi sistem etnik, agama, dan adat. Akibatnya sering terjadi kontak budaya yang melahirkan bentrok fisik.

Hadirin yang saya hormati

Ada tiga kekuatan politik besar yang ditengarai masuk dalam wilayah persaingan yaitu: (1) birokrat yang berlatar belakang bangsawan yang berhasil bertahan hidup melewati pelbagai macam rezim sejak periode kolonial; (2) birokrat yang berasal dari masyarakat awam kebanyakan; dan (3) para *local*

strongmen. Persaingan ini terkadang berwujud aneh karena adakalanya mereka bersekutu, tetapi dilain kesempatan mereka saling memangsa. Persaingan ketiga kekuatan ini misalnya dapat terlihat jelas dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Karena *trend* kekuasaan di tingkat lokal pada umumnya masih terhimpun di tangan sejumlah politisi berlatar belakang birokrat awam, maka ketika mereka kurang berhasil melaksanakan amanat otonomi, kelompok birokrat lainnya (yang berlatar belakang bangsawan) memanfaatkan kesempatan ini untuk menentang pemerintahan yang eksis.

Jamie (2010) menyatakan bahwa pada masa kolonial, adat sebagai sebuah kekuatan politik yang berada dalam kekuasaan kolonial untuk melindungi kelompok masyarakat adat yang lemah terhadap kelompok luar yang kuat seperti kaum pemilik modal yang akan mengambil alih tanah-tanah warisan leluhur dan kaum birokrat yang akan menghancurkan adat kebiasaan mereka. Hal ini terlihat pada sikap dan mentalitas bangsawan menghadapi modernitas mengacu pada model respon yang disarankan oleh Dogan (1989) yaitu model respon menjaga batas-batas (*maintenance boundaries*). Ini terjadi ketika masyarakat menerima sebagian tetapi menolak sebagian yang lain dan membiarkan keduanya hidup berdampingan secara damai.

Kajian tentang budaya politik (*local strongmen*) bermuansa perjuangan akan- hak-hak rakyat telah banyak ditulis. Tokoh orang kuat lokal seperti Ken Arok, Samin, Pitung dan lainnya, yang berupaya melawan pusat kuasa memantulkan sedikit dari sekian banyak bentuk ataupun hasrat pembangkangan sipil pada masa lalu. Namun mengikuti banyak kisah, pada masa lalu orang kuat lokal memiliki citra positif dan peran signifikan di mata masyarakat. Citra dan peran seperti pembelaan para *local strongmen* terhadap kepentingan rakyat yang tertindas, walau dari cara pandang yang berbeda di pihak penguasa. Fenomena orang kuat seperti ini juga ada di Maluku Utara seperti para bangsawan kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Meskipun demikian, terkadang kehadiran dan kiprah para orang kuat lokal telah menegaskan atas melembaganya *local strongmen* dan polisentrisme di masa lalu.

Tetapi malangnya, kisah di atas mulai lenyap, tidak berbanding lurus dengan temuan dan fakta empiris. Masyarakat tradisional sering hanya dimanfaatkan pada momen-momen tertentu terutama pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Bahkan sering dijadikan kekuatan (massa rakyat) untuk mempengaruhi berbagai "kebijakan negara" dan keputusan-keputusan politik dan hukum. Sangat memprihatinkan sebab lembaga/prana sosial ini adalah simbol pranata budaya yang mestinya berperan sebagai pelakon demokrasi dan pengusung hak-hak masyarakat bukan sebaliknya dapat dimanfaatkan oleh para oknum tertentu dalam lingkaran budaya terdalam. Davidson (2010) menggarisbawahi bahwa manifestasi politik lokal dan adat di wilayah-wilayah bekas kesultanan senantiasa mencerminkan manipulasi terhadap tradisi oleh aktor politik yang mencari kepentingan sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan manifestasi politik dan demokrasi di kalangan bangsawan dan masyarakat adat masih didominasi oleh tradisi dan kekuasaan yang berbasis pada figur kharismatik dan feodalisme yang belum sepenuhnya menjadi kekuatan dalam mendorong kemajuam pembangunan di bidang politik dan demokratisasi di tingkat lokal.

Hadirin yang saya hormati

Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo (2001), untuk daerah Maluku Utara, terdapat perubahan paradigma/pengertian tentang orang kuat lokal dalam konteks bosisme (pemilik modal). Jika di pulau Jawa, orang kaya (orang kuat lokal) didefinisikan sebagai komunitas pebisnis (*businessmen*) yang memiliki sawa, perkebunan, perusahaan produksi dan lain sebagainya, maka orang kaya di Maluku Utara adalah kelompok penguasa yang memegang jabatan tertentu di pemerintahan. Dengan kata lain, orang kaya Maluku Utara identik dengan kekuasaan alias menimbun kekayaan melalui kekuasaan.

Berkaitan dengan pokok bahasan dalam tema di atas yakni pergolakan tradisi dan modernitas di kalangan masyarakat, terdapat sejumlah kondisi yang perlu diperhatikan. **Pertama**, dalam kehidupan suatu masyarakat terdapat nilai-nilai tradisional yang dapat dilestarikan dan dijadikannya sebagai pandangan hidupnya. Proses pewarisannya melalui transformasi budaya atau pendidikan (Judistira, 1992). **Kedua**, bahwa setiap tradisi memunculkan kategori-kategori budaya masa kini yang mencerminkan suatu hubungan dengan masa lalu (Fedyani, 2005). Pendekatan antropologi terhadap proses perubahan waktu, yaitu masa lalu ditandai dengan tradisi dan masa kini serta masa yang akan datang ditandai dengan modernitas. Nilai-nilai tradisional (kesultanan) pengabdian, kepatutan dan ketaatan sebagai nilai utama yang masih tetap berlangsung dan dilaksanakan oleh bangsawan dan masyarakat. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai sekarang.

Ketiga, munculnya sikap masyarakat tradisional dengan menonjolkan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan sebagai simbol penghormatan terhadap figur kultural. Inilah ciri tradisi sebagaimana dijelaskan oleh (Kuper, 1999) sebagai cerminan sikap feodalis. Ini terjadi akibat pengkultusan nilai-nilai adat oleh para elite-elite politik lokal seperti nilai-nilai pengabdian, kepatuhan, dan kesetiaan yang dimanfaatkan oleh sebagian kelompok elit politik lokal untuk memperoleh dukungan politik.

Dalam pandangan Dove (1989), kesetiaan ditunaikan karena terbentuk jaringan sosial yang saling mengikat dari atas sampai ke bawah, terjalin sebagai suatu ikatan feodal yang semata-mata berdasarkan atas nilai pengabdian dan nilai kesetiaan. Di samping kekuasaan yang memiliki otoritas tradisional, masih ada bentuk hubungan kekuasaan yang bersumber pada kualitas pribadi yang dibawa dari lahir berupa kekuatan gaib (supranatural) dalam wujud kewibawaan. Hal ini yang sering mempermudah akses para tokoh bangsawan dalam politik di era otonomi daerah. Kemudahan akses ini dapat dilakukan karena sebagian masyarakat akar rumput (*grass root*) masih percaya adanya model kepemimpinan feodalistik dengan simbol tokoh kharismatik dan terpercaya. Kelompok bangsawan dan masyarakat tradisional merasakan adanya semacam perlindungan dengan kehadiran simbol-simbol kepercayaan tersebut.

Hadirin yang saya hormati

Dari sinilah sumber pergolakan antara tradisi dan modernitas mencapai titik temu. Titik pacunya berada pada peran dan kerja-kerja politik antara partai politik dan pranata-pranata sosial lainnya seperti lembaga adat dan organisasi massa (ORMAS/OKP/OKK). Dua arus besar (tradisi dan modernitas) ini harus menyatu atau disatukan. Tradisi tidak harus dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan modernitas. Partai politik yang sering dibentuk sebagai "kelompok menengah", sangat perlu mengungkapkan tujuan-tujuan modernisme dalam bentuk-bentuk tradisi dan simbol tradisi dengan

mempergunakan berbagai perangkat modernitas yang nyata, berbagai media informasi massa dan persuasi.

Balandier (1986) mensinyalir bahwa dengan menghidupkan kembali simbol-simbol lama (tradisional) yang efektif, maka para warga lokal pun akan mengorganisir upacara-upacara kehidupan politik (memasukan eleven-elemen ritual), untuk membuatnya menjadi suci, dan sekaligus memberi warna para elite bangsawan atau penguasa suatu wajah ganda atau mencampurkan cara-cara tradisional untuk memaksakan rakyatnya untuk membangun relasi sosial dalam bentuk dukungan atau partisipasi politiknya. Hal ini sejalan dengan gagasan Klinken (2010) bahwa kembalinya para sultan dari pentas gerakan komunitarian dalam politik lokal secara sosiologis adalah sebuah pengecualian yang dapat dipandang sebagai bagian dari politik lokal.

Sejarah memang mencatat bahwa setelah lahirnya Orde Baru 1965-1966 pihak militer memanfaatkan para sultan sebagai bagian dari kampanye melawan partai-partai nasionalis kiri. Magenda (1989) dalam kajiannya bahkan menyebutkan bahwa kemunduran kelompok bangsawan kerajaan terjadi sejak lama sampai periode awal Orde Baru sebagai sebuah kebangkitan kembali unsur-unsur yang muncul dalam masa pemerintahan federalnya Van Mook: tuntutan keras oleh pemangku kekuasaan di daerah untuk menjadi Gubernur atau Bupati, perlindungan hak-hak minoritas, dan tuntutan akan kemajuan dan pembangunan.

Dengan adanya transformasi modernitas politik, para tokoh-tokoh adat (Sultan dan bangsawan) diharapkan menjelma sebagai representasi adat kebiasaan, identitas, komunitas lokal, dan milik bersama (*common good*) sebagai bentuk warna komunitarian. Quin (2003) bahkan sampai pada kesimpulan, pemujaan makam-makam keramat para sultan di Indonesia merupakan komponen penting dalam legitimasi politik. Quin berpendapat bahwa hal ini sebuah persoalan tentang praktik-praktik lokal penuh daya kekuasaan yang telah berabad usianya yang tidak akan rontok dan mati. Kreshaw (2001) memaparkan bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dengan menyimpulkan: "kharisma" kerajaan-kerajaan ini bisa memberikan suatu sumber potensial bagi sebuah negara modern daripada yang dapat diberikan oleh kompetisi demokrasi yang tidak pernah teruji dan penuh gejolak. Galvan (2000) menyebut tinjauan aspek sosiologis terutama yang membuat lembaga-lembaga adat merupakan sumber kesatuan penting (dan sah) bukan keantikannya, melainkan karena kenyataan bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah mempresentasikan kembali dalam cara yang lebih inklusif. Hal ini memberikan suatu nilai kedudukan yang positif dan integratif dalam situasi yang rentan konflik, misalnya kesultanan Jogyakarta.

Simbol-simbol kesultanan memunculkan keraton dapat menimbulkan hierarki dan membantu menjelaskan popularitas kesultanan. Selain itu, merepresentasikan konservatisme sosial dan stabilitas berpolitikan pada tingkat lokal (Kuper, 1999). Gagasan Durkheimian yang fungsional tentang hati nurani kolektif yang asli, yakni sebuah payung yang memayungi keseluruhan, mempunyai daya pikat romantik. Kembalinya para sultan adalah sebuah gagasan yang selaras dengan adat. Gagasan ini merepresentasikan 'modal sosial'. Sebuah antidot (penawar atau pencegah, penyunting) terhadap hal-hal yang oleh Giddens disebut dengan pelepasan dari modernitas (Giddens, 1991).

Hadirin yang saya hormati

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pergolakan tradisi dan modernitas semakin nampak (termasuk di Ternate) terutama pascareformasi. Hal ini ditandai dengan kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru. Sementara golongan bangsawan kadang masih mendua atau ambigu, di satu sisi bangsawan ingin menghendaki masyarakat itu loyal tetapi di lain sisi nilai-nilai modernitas mengganggu sikap loyalitas mereka terhadap bangsawan itu.

Mengakhiri orasi ilmiah ini saya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan dalam membangun modernitas politik dan tradisi di tingkat lokal. Pokok-pokok pikiran dirangka berdasarkan pembacaan secara akademik teori dan fenomena politik tingkat lokal yang terjadi saat ini.

Pertama, modernisasi politik di tingkat lokal bukan hanya menuntut pemaknaan atas simbol-simbol politik secara substantif, tetapi juga mempertimbangkan konteks nilai-nilai lokal secara arif. *Kedua*, pendidikan politik (sebagai bagian dari upaya membangun *civic literacy*) menjadi proses penting yang dilupakan partai politik di tingkat lokal. Oleh karena itu perlu desain khusus pendidikan politik dijalankan partai hingga membuat tersambung secara idiologis dengan warga pemilih. *Ketiga*, kebangkitan adat merupakan sebuah kontribusi yang konstruktif bagi pluralisme politik baru Indonesia. Oleh karena itu, adat perlu dikelola dan diposisikan secara adil dalam konteks pengelolaan pembangunan daerah. *Keempat*, preferensi warga masyarakat sebagai pemilih harus dibangun di atas kesadaran tentang pentingnya platform dan program kerja partai politik, bukan pada transformasi loyalitas primordial ke dalam wilayah politik di tingkat lokal.

Kelima, desentralisasi dan otonomi daerah harus dijalankan dengan berimplikasi terhadap eksistensi komunitas adat dalam konteks suku, agama, wilayah, dan pengelolaan sumber-sumber daya alam dengan dalil kesejahteraan masyarakat. *Keenam*, pembaharuan dan penyesuaian regulasi di tingkat daerah yang mengatur penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk batas-batas wilayah antara desa, kecamatan, dan kabupaten perlu diilhami oleh nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat. *Ketujuh*, perlunya penataan peran dalam bentuk regulasi tertulis tentang gerakan komponen masyarakat, seperti organisasi tingkat wilayah, kelompok adat, kumpulan pelajar dan mahasiswa, paguyuban, kumpulan keluarga besar dalam proses politik lokal.

Semoga kita semua mampu menghargai adat dan tradisi ditengah pergolakan politik dan modernitas saat ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ternate, 1 September 2012.

Dr. Syahril Muhammad, M.Hum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2010. *Politik Lokal di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi* . Jurnal Ilmu Politik AIPI Pustaka Pelajar: University Kebangsaan Malaysia.
- Agus Yusuf, 2010. *Dinasti Politik di Banten PascaOrde Baru. Sebuah Amatan Singkat*. Jurnal Administrasi Negara. Hlm. 119-131.
- Arghiros, 2001. *Democracy, development and secentralization in provincial Thailand* Surrey: Curzon
- Balandier, G. 1986. *Polical Antropology* (penterjemah : Y.Budisantoso). Jakarta: CV. Rajawali.
- Jamie, Davidson at all. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Kerjasama KITLV –Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Dogan Hasan, Z. 1989. *Froms of adjustment: Sociocultural Impacts of Tourisme** , *Annals of Tourism Research* 16
- David, M. 1994. *The Conditions of Postmodernity* (Cambridge : Basil Bleackwell Ltd.
- Dove, Michael R. 1988. *Peran Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Fedyani, A. 2005. *Antropologi Kontemperer*. Fajar Intanpratama Offset : Jakarta.
- Giddens, 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Harris. White 1999. *How India works : the character of the local economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Judistira, 1992. *Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional Berbasis Relligius*. Yogyakarta : Kanisius.
- James Harve, 1965. *The New History*. New York. The Free Press.
- Kuper,A. 1999. *Culture : The Antropologissts' Account*, Cambridge. Mass: Harvard University Press.
- Kartodirdjo, S. 2001. *Kumpulan Materi Kuliah ; Metodologi Penelitian Sejarah*. Fakultas Ilmu Budaya: UGM Yogyakarta.
- Kershaw, R. 2001. *Monarchy in South East Asia: The faces of tradition in transition*, London: Rautledge.
- Magenda, B. 1989. *The Surviving aristocracy in Indonesia Politics in Three province of the outhar islands*. Cornell University.
- Quin, G. 2003. *National Legitimacy through a regional prism: Local pilgrimage and Indonesia's Javanese presidents'*, *Adat Dalam Polittik Indonesia*(2010), penyunting Jamies et.al. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- R McVey, 2000. *Money and power in provincial Thailand*. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studeis.
- Robinson, 2004. *Reorganising power in Indonesia: the politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routeledge Curzon.
- Syahril,M.2011. *Dilema Perkembangan Masyarakat Ternate Menghadapi Tarikan Tradisi dan Modernitas: Studi tentang Orientasi Nilai Bangsawan Ternate* (Disertasi) UPI Bandung.
- Vedi R. Hadiz 2003 *Power and Politics in North Sumatra: the uncompleted reformasi*. Singapore: ISEAS. Hlm.119-131.

van Kesteren, G. 2007. *Communal violence and democratization in Indonesia: small town wars*. London: Routledge.

_____. 2010. *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal*. Jakarta: Komisioner KITL V - Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.

Tulisan ini disampaikan pada acara wisuda Sarjana dan Magister Universitas Khairun Ternate 1 September 2012